



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Bandung juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi kedua Pemerintah Kota Bandung yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh

perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya system desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung

oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan melalui visinya **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”**.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

- 1.2.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2.3 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 1.2.4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung (RPJMD 2013-2018).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu;

- **Tugas Pokok :**

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.

- **Fungsi :**

- Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanakan kebijakan lingkup;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika;
- Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas**

- b. Sekretaris, membawahkan :**

- 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub.Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program

- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :**

- 1. Seksi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:**

- 1. Seksi Interkoneksi dan Jaringan;
 - 2. Seksi Manajemen Perangkat Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Publik.

- e. Bidang Data dan Statistik, membawahkan;**

- 1. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
 - 3. Seksi Publikasi dan Data Terbuka.

- f. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, membawahi;**

- 1. Seksi Pengolahan Aplikasi;
 - 2. Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi;
 - 3. Seksi Integrasi Sistem Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPT Radio Sonata
2. UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan (Pusmip)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

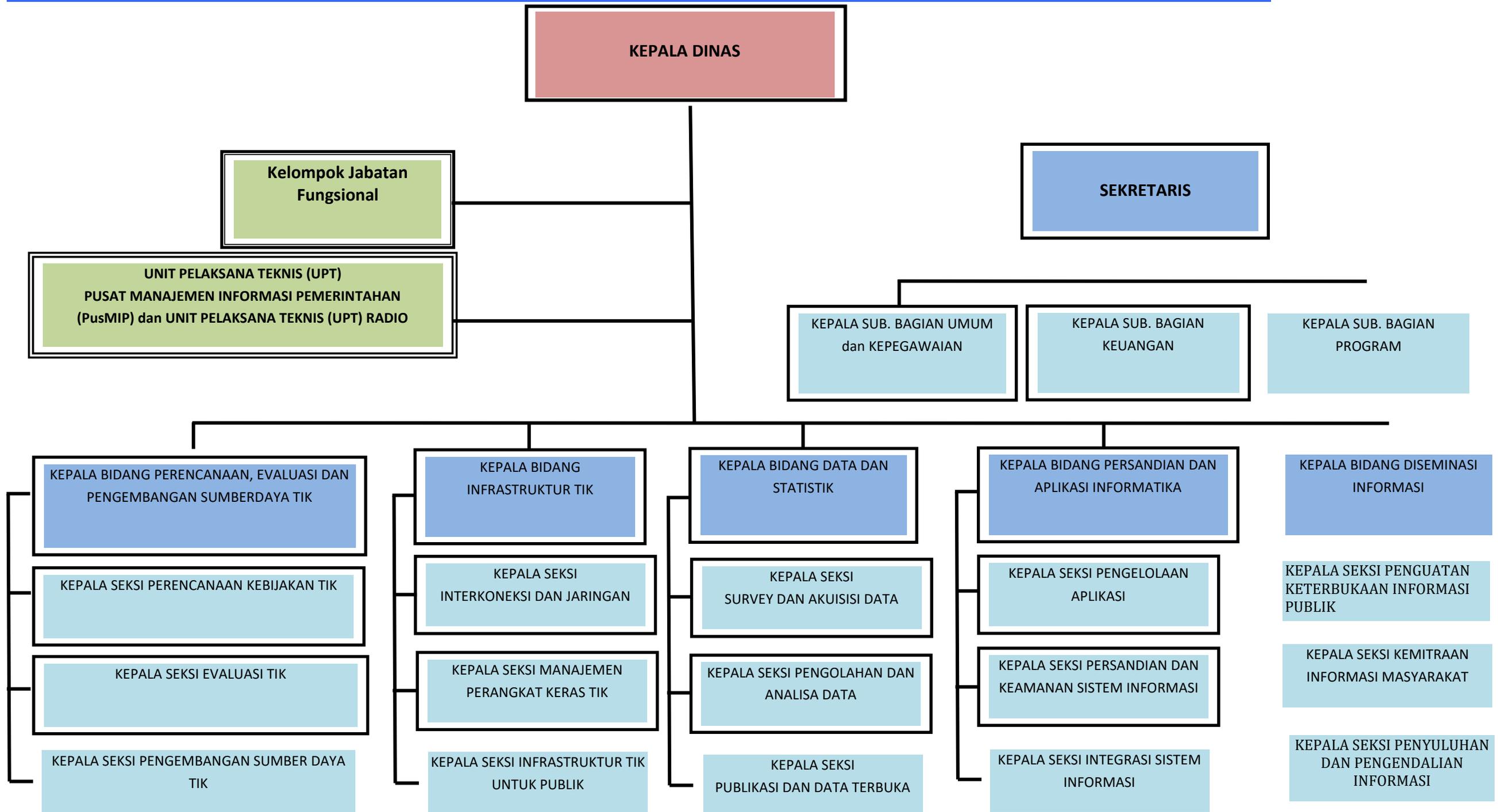
• **Jumlah Personil Susunan**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SKPD , Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah sebanyak 68 orang PNS, terdiri dari;

- Eselon II b sebanyak 1 orang
- Eselon III a sebanyak 1 orang
- Eselon III b sebanyak 5 orang
- Eselon IV a sebanyak 17 orang
- Eselon IV b sebanyak 2 orang
- Fungsional Umum 31 orang
- Fungsional tertentu 2 orang
- Sedangkan pelaksana sebanyak 9 orang



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(Perwal No. 1393 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung)



2.2 Sumber Daya SKPD

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

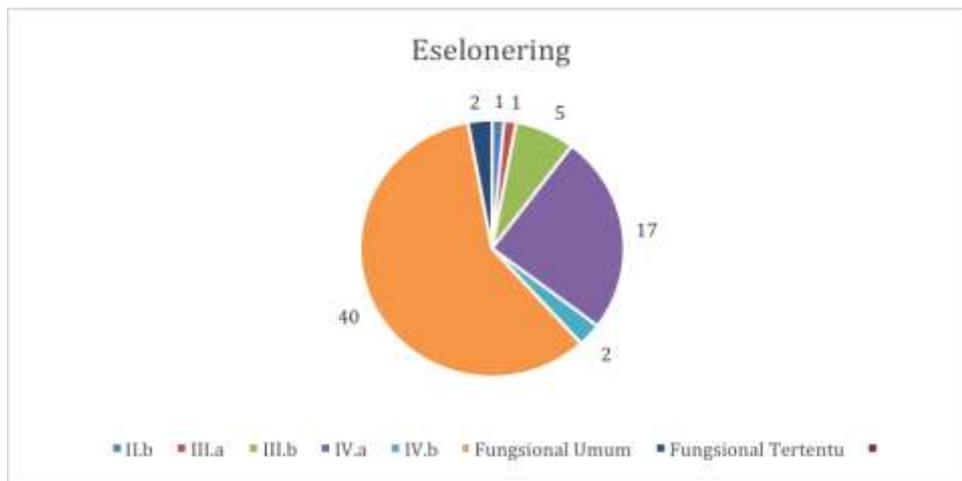
➤ Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 68 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 68 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 17 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang serta pelaksana sebanyak 42 orang.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1.47%
III.a	1	1.47%
III.b	5	7.35%
IV.a	17	25.00%
IV.b	2	2.94%
Fungsional Umum	40	58,82%
Fungsional Tertentu	2	2.94%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

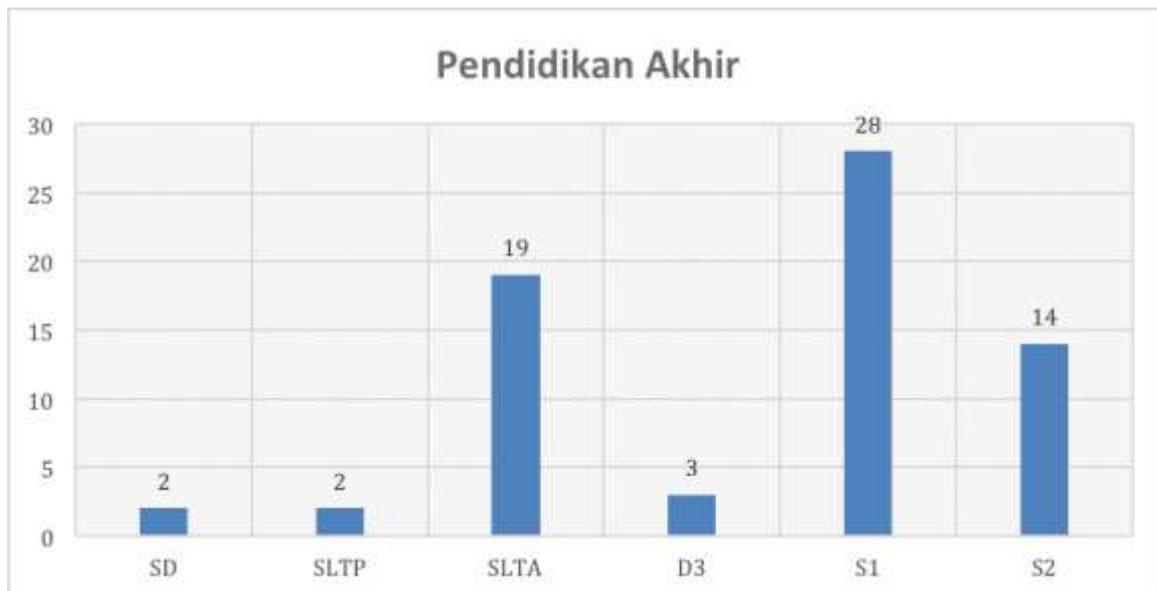


Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SD	2	2.94%
SLTP	2	2.94%
SLTA	19	27.94%
D3	3	4.41%
S1	28	41.18%
S2	14	20.59%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 2 orang (2,94%) memiliki pendidikan SD, pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (2,94%), pendidikan SLTA sebanyak 19 orang (27,94%), pendidikan D3 sebanyak 3 orang (4,41%), pendidikan S1 sebanyak 28 orang (41,18%) dan pegawai yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 14 orang (20,59%).

- Penunjang lainnya berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika (komputer, kendaraan bermotor roda dua dan empat dan lain-lain)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu dapad RJPMD Kota Bandung 2013-2018 juga pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008) di lihat pada tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini;





Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	SPM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Permen Kominfo No.22/PER/M.KO MINFO/12/2010)																		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																		
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui;																		
	a. Media massa, seperti; majalah, radio dan televisi	12 kali pertahun			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	b. media baru seperti website (media online)	Setiap hari			Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Melalui tradisional seperti; pertunjukan rakyat	12 kali pertahun			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Media interpersonal seperti; saresehan, ceramah/disk usi dan lokakarya; dan /atau	12 kali pertahun			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Media luar ruang seperti; bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 kali pertahun			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																		



N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	IKK (Indikator Kinerja Kunci) PP 6/2008																		
	Komunikasi dan Informatika		1. Jumlah jaringan komunikasi		10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Rasio wartel/wartel terhadap penduduk		250 wartel/warnet	250 wartel/warnet	260 wartel/warnet	260 wartel/warnet	170 wartel/warnet	250 wartel/warnet	250 wartel/warnet	260 wartel/warnet	260 wartel/warnet	170 wartel/warnet	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Jumlah surat kabar nasional/lokal		89 media	116 media	123 media	129 media	134 media	89 media	116 media	123 media	129 media	134 media	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal		56 stasiun	56 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	56 stasiun	56 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
PENDAPATAN			15.114.245.000	3.200.000.000	3.300.066.000			1.629.159.022	-	-			11%	-	-		
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	3.960.993.137,19	4.783.595.974,15	7.819.045.500	5.759.688.833	6.937.394.767	3.800.791.819	3.388.708.660	4.449.626.001	5.424.333.631	6.494.463.591	95%	71%	57%	94%	94%		
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	1.020.925.000	1.287.550.000	1.272.725.000	3.345.350.000	4.973.120.000	978.166.000	1.113.951.000	1.204.775.000	3.021.304.000	3.850.115.000	95%	87%	95%	90%	77%		
- Belanja barang dan jasa	9.100.000.578,14	15.307.987.707	14.134.175.000	33.919.687.502	65.299.828.212	8.896.153.714	14.652.460.362	13.629.995.951	30.502.585.858	54.773.149.513	97%	96%	96%	90%	84%		
- Belanja modal	1.099.285.00	1.346.111.000	25.919.214.500	10.039.135.000	10.997.672.000	1.055.421.750	1.205.837.147	25.443.296.890	8.312.057.412	8.491.084.596	96%	90%	98%	83%	77%		
Total	15.181.253.715,19	22.725.244.681,15	41.326.114.500	53.063.861.335	88.208.014.979	14.730.533.283	20.360.957.169	40.268.067.841	47.260.280.901	73.608.812.700	97%	90%	97%	89%	83%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan/ Strength (S)

- Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi jabatan fungsional mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada kekuatan keahlian (*Expert Power*).
- Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas serta aktivitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun *Partner Aliansi Strategic* dengan berbagai lembaga pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.
- Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya

pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik. Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi *electronic government (e-gov)* pada Pemerintah Kota Bandung. Salah satu sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika adalah SMS gate Way dan *Internet Service*. Hal ini memungkinkan hubungan administrasi antar kantor-kantor Pemerintahan di berbagai level dilakukan secara efektif dan profesional.

b. Kelemahan/ weakness (W)

- Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional yang sering kita kenal dengan *standard operating procedure (SOP)*. Belum tersusunnya SOP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “*One-Stop Service*” karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti.

- Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan belum memadai, seperti kurangnya penyediaan air bersih dan air kotor, persampahan, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan sarana lalulintas, terjadinya banjir merupakan indikasi utama mengapa sangat segera perlu ditingkatkannya prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia.
- Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya sistem pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Dengan demikian terkesan bahwa pengelolaan uang rakyat (*public money*) belum dilakukan secara transparan dengan mendasarkan kepada konsep *Value for Money* (ekonomis, efisiensi, dan efektif), sehingga tercipta akuntabilitas publik dan aset daerah belum optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang/ opportunities (O)

- Dibukanya Tol Cipularang telah mengakibatkan volume arus lalulintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang jumlahnya meningkat tajam serta adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang;
- Peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada periode 2008-2013 menunjukkan peningkatan yang positif. Jika pada Tahun 2008 LPE Kota Bandung mencapai 8,17%, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 9,40%. Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Selama periode 2008-

2012, rata-rata LPE Kota Bandung mencapai 8,59%, sedangkan rata-rata LPE nasional secara periode 2008 – 2012 hanya berada di kisaran 5,89%.

- Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik ditingkat nasional atau bahkan tingkat internasional seperti ITB, UNPAD, UNPAR, UPI, UNPAS, UNLA dan UNISBA serta perguruan tinggi swasta lainnya, sehingga Kota Bandung berpotensi untuk dikembangkan sebagai *center of excellence* atau pusat keunggulan dibidang SDM, selain itu pula, Kota Bandung memiliki tempat pendidikan dan latihan militer seperti KODIKLAT, dan SESKO TNI, pusat industri strategis PINDAD, PTDI, LEN, dan INDOSAT serta kantor Pusat TELKOM telah mendorong kota Bandung posisinya sebagai kota jasa (*service city*) yang berkelas internasional. Banyaknya pusat perdagangan khususnya factory outlet dan wisata kuliner yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang baik dari Jakarta maupun dari daerah lain untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandung.
- Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuka peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah dalam rangka mendukung perwujudan visi kota ke depan. Selain hal tersebut semangat otonomi daerah yang luas membuka peluang daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan optimalisasi peningkatan dan pertumbuhan perekonomian kota.

b. Ancaman/ Treaths (T)

- Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
- Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandung sebagai kota jasa.
- Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kota Bandung selama ini menunjukkan peningkatan dan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 2.424.957 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 2.445.517 pada tahun 2012, sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung pada Tahun 2012 menjadi 1,26%. Namun populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya jumlah pengangguran sebanyak 107.384 orang pada Tahun 2012.
- Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum

menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.

- Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

Atas dasar tersebut maka faktor kunci keberhasilan adalah :
untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Bandung sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparaturnya Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam rangka menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mempercepat penyampaian Informasi kepada SKPD dan ditindaklanjuti sehingga mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Adanya dukungan kemitraan dari rekan kerja Diskominfo seperti; Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), ORARI, RAPI dan kelompok informasi lainnya sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Belum adanya masterplan tentang teknologi komunikasi dan informasi;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Koneksitas internet di SKPD masih belum optimal;
5. Satu Data untuk Pembangunan Kota Bandung.

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan Program Bandung Smartcity;
2. Banyaknya Lembaga Pendidikan di Bidang Komunikasi dan Informatika;

3. Pelatihan atau Bimtek bidang komunikasi dan informasi secara terus menerus dilakukan baik aparatur maupun kelompok masyarakat;
4. Adanya pusat informasi Bandung Command Center sebagai rujukan kebijakan pimpinan;
5. Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah
6. Ketersediaan alat informasi melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Radio Sonata FM/AM, internet, pelayanan pengaduan publik, dll);
7. Tingginya peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Bandung melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan mitra kerja lainnya;
8. Ketersediaan bandwidth yang ada sehingga dapat diakses secara maksimal;
9. Adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan komunikasi dan informatika;
10. Adanya komitmen semua unsur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Masih kurangnya Aplikasi yang terkoneksi secara terpusat;
- b. Masih belum adanya jalur koneksitas antar SKPD;
- c. Masih kurangnya sarana Komunikasi dan Informatika;
- d. Masih belum adanya satu data untuk pembangunan Kota Bandung;
- e. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi

3.2 Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bandung serta RPJMD Kota Bandung 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;

- a. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikutserta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung
- b. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- c. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

<p style="text-align: center;">ALI</p> <p style="text-align: center;">ALE</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan/Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya aparatur yang memadai 2. Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif 4. Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi. 	<p style="text-align: center;">kelemahan/Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme SOP belum tersedia 2. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik 3. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah 4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai 5. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
<p style="text-align: center;">Peluang/Oportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas tol cipularang dengan ibu kota negara 2. Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian 3. Pengembangan kota jasa yang profesional 4. Pusat pendidikan, perekonomian dan perdaganganyang luas 5. Adanya pelimpahan urusan /kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas 2. Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan Kota Bandung sebagai kota jasa. 3. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. 4. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif 2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
<p style="text-align: center;">Ancaman/Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok. 2. Krisis keuangan global. 3. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 4. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. 5. Penurunan luas lahan terbuka hijau. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecen-derungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM 2. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki manajemen layanan publik berbasis <i>reinventing government</i> 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera.
- c. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

d. Leadership Kepala Daerah yang kapabel, kreatif dan aspiratif mendorong pengembangan Kota Bandung sebagai kota jasa yang profesional.

2. *Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)*

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM .
- b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.

3. *Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)*

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. *Strategi Kelemahan dan Ancaman (W - T)*

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap

SKPD. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Dalam penentuan isu-siu strategis

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain;

1. Terwujudnya Bandung Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan, sebagai leading sector dilaksanakan oleh urusan Komunikasi dan informatika serta didukung oleh semua urusan pemerintahan lainnya;
2. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota;
3. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
4. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
5. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
6. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus

mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu ***Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera.***

Secara harfiah, penjabaran **unggul** adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu

kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti; tanah, air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsive terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin warganya agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dari wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan social masyarakat.

Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi; ruhani, akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung yaitu *“Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”* maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Rencana Strategis 2013-2018

Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah ; manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan serta kokohnya interaksi social, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.

Misi Kota Bandung yang meliputi :

1. *Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;*
2. *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;*
3. *Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;*
4. *Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.*

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

Dengan gambaran umum seperti yang diuraikan pada Bab I Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Rencana Strategis 2013-2018

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

“TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK Mendukung Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai berikut:

- Terwujud efektivitas dan efesiensi Komunikasi dan Informatika, adalah terciptanya pusat pelayanan Informasi bagi warga kota Bandung terutama dalam mengakses data yang memerlukan Informasi baik yang menyangkut kebijakan umum pemerintah kota maupun perijinan-perijinan. Dengan pemahaman ini akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami Informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Bandung Kota Unggul adalah kota yang memiliki kelebihan dari daerah-daerah lain terutama dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- Bandung sebagai Kota Nyaman adalah memberikan kebebasan, privasi dan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengakses setiap informasi program pembangunan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bandung.

MISI SKPD

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yaitu:

Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah yang tercantum dalam Misi 2 ” *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani*” pada RPJMD 2013-2018, Tujuan RPJM adalah :

❖ Sebelum Revisi

TUJUAN

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai tujuan RPJMD dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan ditetapkan, yaitu:

SASARAN

1. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur jaringan;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Membangun Citra Positif Kota Bandung di Media;
5. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Dari Tujuan dan sasaran ini, memiliki **indikator kinerja** yaitu;

1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-Government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi;
2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center;
3. Prosentase fasilitas umum yang sudah memiliki wifi;
4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
5. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung;
8. Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Nilai Evaluasi LAKIP;
10. Prosentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;
11. Turunnya Temuan BPK/inspektorat;
12. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebelum Revisi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya reformasi birokrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-gornment	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	10%	15%	20%	50%	75%	100%
			Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center		30%	60%	70%	90%	100%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Prosentase fasilitas umum yang sudah memiliki wifi	10%	15%	25%	50%	75%	100%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	75%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	72	73	74	74,5	75



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	40%	50%	60%	80%	90%	100%
		Membangun citra positif Bandung di media Kota di	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	60:40	62:38	64:36	65:35	70:30	75:25
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	90%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai evaluasi LAKIP	53	54	65	70	75	76
			Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
			Turunnya Temuan BPK/inspektorat				100	40	60
			Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika				110	120	130

❖ **Setelah Revisi**

TUJUAN

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai tujuan RPJMD dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan ditetapkan yaitu:

SASARAN

1. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government;
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur jaringan;
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Dari Tujuan dan sasaran ini, memiliki **indikator kinerja** yaitu;

1. Jumlah integrasi aplikasi layanan public dan atau tata kelola pemerintah;
2. Jumlah interkoneksi antar SKPD dan sekolah;
3. Koneksi wifi/hotspot area public dan koneksi CCTV;
4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD;

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Setelah Revisi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)
1	Terlaksananya reformasi birokrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-gornment	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	143 aplikasi	7 aplikasi	5 Aplikasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal Periode RPJMD (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	191 lokasi	154 lokasi	138 lokasi
			Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	87 Lokasi	102 lokasi	210 Lokasi
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	75%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan SKPD, adapun strategi dan kebijakan SKPD yaitu;

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-gornment	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area public menuju <i>cyber city</i> dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan jaringan	
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan public	Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan
4	Meningkatnya kualitas data dan informasi publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

- 1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- 1.2 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi
- 1.3 Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi
- 1.4 Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
- 1.5 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
- 1.6 Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center
- 1.7 Kegiatan Penyampaian Informasi dan Komunikasi
- 1.8 Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Kebijakan Pos dan Telekomunikasi
- 1.9 Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi
- 1.10 Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi
- 1.11 Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik

1.12 Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi dan Informasi

2. Program fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi

2.1 Pelatihan Sumberdaya Manusia dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

3. Program Pengembangan Data dan Informasi

3.1 Penyusunan dan pengumpulan data atau informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3.2 Operasional sistem data base statistik daerah

3.3 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik.

Sedangkan untuk belanja langsung Non Urusan, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.3. Penyediaan alat tulis kantor

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.5. Penyediaan peralatan rumah tangga

1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.7. Penyediaan makanan dan minuman

1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Perkantoran/teknis perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Adapun rencana program Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat di lihat pada Tabel 5.1 di bawah ini;

Tabel 5.1a
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
Sebelum Revisi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	
Terlaksananya reformasi birokrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-gornment	1. Cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan	25	1..2.5.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	35%	50%	30.000.000.000	75%	8.923.500.000	85%	6.630.611.112	100%	7.293.672.223	100%	8.023.039.446	100%		
			25	1..2.5.01	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Sewa Bandwith 10 Mbps Collocation 512 KBPS, penyusunan Rencana Detail TIK dan CCTV internal	Setiap hari	Seluruh kecamatan dan SKPD	2.700.000.000	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW serta Rencana Detail TIK	4.423.500.000	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW	3.443.672.223	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW	3.788.039.446			
			25	1..2.5.01	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Maintenance Tower Maintenance hardware Pengembangan Web.Bandung.go.id dan Operational Room	Pembuatan spftware dan hardware operational room	27.300.000.000	Pengelolaan dan penyempurnaan operational room	4.500.000.000	Pengelolaan dan penyempurnaan operational room	3.500.000.000	Pengelolaan dan penyempurnaan operational room	3.850.000.000	Pengelolaan dan penyempurnaan operational room	4.235.000.000			
		2. Tingkat layanan interaksi pengadaan secara on-line	25	1..2.5.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	75%	100%	950.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%		
			25	1..2.5.01	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pengaduan masyarakat, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan SMS gateway	Setiap hari	Setiap hari	950.000.000	Setiap hari	1.000.000.000	Setiap hari	1.100.000.000	Setiap hari	1.210.000.000	Setiap hari	1.331.000.000		
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	25	1..2.5.01	06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	B	B		B	75.000.000	B	82.500.000	A	90.750.000	A	99.825.000			
			25	1..2.5.01	06	05	Kegiatan penyusunan profil dinas	Tesusunnya IKM dinas				1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000		
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Nilai evaluasi LAKIP	25	1..2.5.01	06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	CC	CC		CC	75.000.000	B	82.500.000	B	90.750.000	A	99.825.000			
			25	1..2.5.01	06	01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)				1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000		
		2.	25	1..2.5.01	06	Program	Peningkatan	100%	100%		100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
									Tahun-2017		Tahun-2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)	
Terlaksananya reformasi birokrasi	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	2	10.2.10.01	15		Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa										
			2	10.2.10.01	15	007	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Meningkatnya Kinerja Pengembangan Informasi Dinas	143 Aplikasi	7 Aplikasi	1.421.244.519	5 Alikasi	1.563.368.970				
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	2	10.2.10.01	15	006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terselenggaranya koneksi internet ke SKPD dan sekolah	191 lokasi	154 lokasi	6.516.385.400	138 Lokasi	7.168.023.940				
		Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	2	10.2.10.01	15	006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terselenggaranya koneksi CCTV dan internet	87 lokasi	102 lokasi		210 Lokasi					
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	2	10.2.10.01	15	009	Kegiatan Peengolaan Pusat Manajemen Informasi Pemerintah	Terkelolanya pengaduan masyarakat secara terintegrasi	100%	100%	4.904.068.423	100%	5.394.475.265				

Tabel 5.1c
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Setelah Revisi (Pendukung Indikator Kinerja Utama)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
									Tahun-2017		Tahun-2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	(22)
Terlaksananya reformasi birokrasi			2	10.2.10.1	15	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK, LAPOR (Layanan Aspirasi Pengaduan On-Line Rakyat)		100%	10.827.231.074	100%	13.589.954.182				
			2	10.2.10.1	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terjawabnya Pengaduan Publik Melalui: sms, media cetak/elektronik, LAPOR dll	2 paket	839,108,774.00	2 paket	923,019,651				
			2	10.2.10.1	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terpeliharanya peralatan komunikasi, pengamanan data dan sistem informasi serta tersedianya alat komunikasi	3 paket	1,190,184,096.00	3 paket	1,309,202,506				
			2	10.2.10.1	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Daya pancar siaran radio yang maksimal, kualitas audio siaran yang memadai dan pengurangan gangguan audio pada saat siaran	3 paket	378,985,700.00	3 paket	416,884,270				
			2	10.2.10.1	15	08	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kajian potensi retribusi dan pendampingan laporan keuangan (Semesteran dan akhir tahun)	3 paket		3 paket	800.000.000				
			2	10.2.10.1	15	11	Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik	Pemeliharaan peralatan radio Sonata FM/AM dan Operasional Radio Sonata FM/AM	3 paket	1,299,083,600.00	3 paket	1,428,991,960				
			2	10.2.10.1	15	12	Pengendalian dan pengembangan kebijakan pos dan telekomunikasi	Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur TIK	2 paket	1,206,663,838.00	2 paket	1,327,330,222				
			2	10.2.10.1	15	13	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	2 paket	2,665,824,866.00	2 paket	2,932,407,353				
			2	10.2.10.1	15	14	Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi	FGD, Tata Kelola TIK, Lokakarya smart city dan star up (Perusahaan rintisan)	4 paket	359,968,000.00	4 paket	395,964,800				
			2	10.2.10.1	15	15	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik	Pengembangan utilitas publik	1 paket	1,400,467,000.00	1 paket	1,540,513,700				
			2	10.2.10.1	15	16	Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi	Kajian Teknologi Informasi Komunikasi	4 dokumen	1,486,945,200.00	4 dokumen	1,635,639,720				
			2	10.2.10.1	15	17	Kegiatan penyampaian informasi komunitas	Tersampainya program/kegiatan kepada komunitas informasi (RAPI, KIM, DSI, relawan TIK)			4 paket	880.000.000				
			2	10.2.10.1	16		Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tingkat ketersediaan data berdasarkan hasil kajian bidang TIK			100%	800.000.000				

			4	05.2.10.01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	809,107,900.00	12 bulan	890,018,690				
			4	05.2.10.01	01	019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran			12 bulan	286,700,000.00	12 bulan	315,370,000				
			4	05.2.10.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.663.259.699	100%	1,829,585,670				
			4	05.2.10.01	02	12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Perlengkapan kantor		3 paket	811,523,240.00	3 paket	892,675,564				
			4	05.2.10.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung		1 paket	649,936,459.00	1 paket	714,930,106				
			4	05.2.10.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor		1 paket	201,800,000.00	1 paket	221,980,000				
			4	05.2.10.01	03		Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100%	212,750,000.00	100%	234,025,000				
			4	05.2.10.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian Dinas Pegawai		2 paket	212,750,000.00	2 paket	234,025,000				

Tabel 5.2a
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
Sebelum Revisi

Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun-2014		Tahun-2015		Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018	
			Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	10%	20%	32.200.000.000	35%	11.798.500.000	58%	9.793.111.112	80%	10.772.422.223	100%	11.849.664.446
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	72		73	300.000.000	74	330.000.000	74,5	363.000.000	75	399.300.000
	Nilai evaluasi AKIP	53	54		65		70		75		76	
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat			300,000,000	3 Paket	330,000,000	3 Paket.	363,000,000	3 Paket.	399.300,000	3 Paket	439.230,000
Program kerjasama informasi dengan mas media	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi			3.175.000.000	100%	6,354,000,000	100%	7,983,561,112	100%	8,737,427,223	100%	9,610,969,946
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran			3.920.000.000	100%	1,385,000,000	100%	2,844,100,000	100%	3,173,000,000	100%	3,490,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.350.000.000	100%	725,000,000	100%	797.500,000	100%	877.250,000	100%	964,975,000
Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur			90,000,000	100%	82,500,000	100%	90,750,000	100%	99,825,000	100%	109,807,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kopetensi SDM Aparatur/Pegawai			245,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000
	JUMLAH			40.955.000.000		21.175.000.000		22.422.022.224		24.664.224.447		27.130.646.892

Tabel 5.2b
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
Setelah Revisi

Program (1)	Indikator Kinerja (2)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (3)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			Tahun-2017		Tahun-2018	
			target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)
Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK		100%	23.668.929.416	100%	26,035,822,358
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat		3 Paket.	2.315.482.833	3 Paket	2,547,031,116
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tingkat validitas data yang tersedia		1 Dokumen	912.668.297	1 Dokumen	1.003.935.126
Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat keamanan dan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan		3 Dokumen	793.458.088	3 Dokumen	872.803.895
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran		100%	4.138.183.097	100%	4,552,001,407
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.663.259.700	100%	1,829,585,670
Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100%	212.750.000	100%	234,025,000
	JUMLAH			33.704.731.430		37,075,204,574.10



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 setelah di revisi, sesuai dengan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut;

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH UTAMA
1	2	3	4	5	6
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan perangkat daerah	Program pengendalian kebijakan KDH	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset	Mewujudkan opini BPK : WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH UTAMA
1	2	3	4	5	6
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Mendapatkan nilai A untuk hasil evaluasi AKIP	Program Peningkatan akuntabilitas Kinerja	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akuntabel/ meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah	Masuk kategori berprestasi kinerja terbaik untuk evaluasi kinerja LPPD	Program Perencanaan pembangunan daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)
	Terwujudnya <i>Bandung smart city</i>	Pelayanan berbasis ICT yang terintegrasi	integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan	Program pengembangan data dan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas

Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Awal (2015)	Capaian 2017	Capaian 2018
			Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	6
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	2	5	100%



Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Awal (2015)	Capaian 2017	Capaian 2018
			Kinerja	Kinerja
1	2	3	4	6
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Pelaksanaan diseminasi & pendistribusian informasi	15 kali	18 kali	20 kali
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah	100%	100%	100%
	Penilaian LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat/ Kemenpan-RB-RB	B	B	A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERIODE RPJMD
		2013	2017	2018	2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada
	Pameran/expo	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Jumlah jaringan komunikasi	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	00.6	00,3	00,3	00,3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	134 media	140 media	140 media	140 media
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun
	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:				
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali	18 kali	20 kali	12
	b. Media baru seperti website (media online)	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	365
	c. Media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 kali	18 kali	20 kali	12
	d. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali	18 kali	20 kali	20 kali

Selain indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018, juga ada indikator kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2014 Tanggal 20 Desember 2010, sesuai dengan hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini;

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2	Pameran/expo	1 Kali	1 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
3	Jumlah jaringan komunikasi	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	10 operator	
4	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	00,6	00,5	00,4	00,3	00,3	00,3	
5	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	134 media	140 media	140 media	140 media	140 media	140 media	
6	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	52 stasiun	



7	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui:							
	7.1 Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12 kali	12 kali	14 Kali	16 Kali	18 Kali	20 Kali	
	7.2 Media baru seperti website (media online)	Setiap hari						
	7.3 Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali	12 kali	14 Kali	16 Kali	18 Kali	20 Kali	
	7.4 Media interpersonal seperti sarsehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 kali	12 kali	14 Kali	16 Kali	18 Kali	20 Kali	
	7.5 Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 kali	12 kali	14 Kali	16 Kali	18 Kali	20 Kali	
8	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	3 paket						



BAB VII PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang unggul, nyaman dan sejahtera.

Adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.